

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016-2020**

**Sri Wahyu Hidayati\*<sup>1</sup>, Masdar Mas'ud<sup>2</sup>, Sylvia Sjarlis<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Magister Manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

<sup>2</sup>Program Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Program Pascasarjana Magister Manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

e-mail: <sup>1</sup>swh.green@gmail.com, <sup>2</sup>masdar.mas'ud@umi.ac.id, <sup>3</sup>sylvia.sjarlis2013@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan data APBD Tahun 2016 sampai 2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk Y sebesar 0,469, hal ini berarti 46,9% variabel Anggaran Belanja Modal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya 53,1% (100% - 46,9%) dijelaskan oleh sebab – sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci** : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

**ABSTRACT**

*The Influence of Regional Own Revenue, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Capital Expenditures in Regencies/Cities in South Sulawesi Province 2016-2020 (supervised by Masdar Masud and Sylvia Sjarlis). The main purpose of this research is to know the analyze whether Regional Own Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund to the Allocation of Capital Expenditure Budget in regency/city in South Sulawesi province. This is a quantitative research. The population of this research are all regencies and cities in South Sulawesi province with data used in this study research were APBD budget District and City in South Sulawesi Province from 2016 to 2020. The analysis method applied in this study research was multiple regression analysis and supported by SPSS Version 22. The result shows that Regional Real Income and the Special Allocation Fund influence positively and significantly Capital Expenditures. On the other hand, the General Allocation Fund does not affect Capital Expenditure. The determination coefficient value for Y is 0,469 it means 46,9% of Capital Expenditure Budget can be explained by three independent variables: Regional Own Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund. Meanwhile, the rest of 53,1% (100% - 46,9%) can be explained by another factor.*

**Keywords**: Regional Real Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.

**PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, “Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hal ini menandai dimulainya era pembangunan mandiri di berbagai daerah. Urusan pemerintah pusat, bersama-sama dengan sumber dana, transfer sarana dan prasarana, dan kepegawaian, diserahkan kepada pemerintah daerah secara desentralisasi. Tujuan otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat, memajukan kemandirian daerah, mampu beroperasi secara mandiri, saling mengatur dan bersaing dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang baik. Melalui otonomi daerah, diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan pembangunan berbagai daerah, sehingga pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, dana/biaya operasional yang diperlukan oleh daerah otonom/pemerintah daerah telah ditetapkan dalam APBD masing-masing. Diharapkan setiap daerah memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor produksi, sehingga memberikan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan potensi daerah dan meningkatkan kinerja keuangan untuk mencapai kemandirian daerah secara efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah. Jika PAD dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan, maka suatu daerah otonom dapat beroperasi dengan baik karena semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyediakan dana untuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD merupakan indikator yang menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan.

Setiap daerah memiliki perbedaan biaya dalam setiap kegiatan pemerintahan, kondisi ini mengakibatkan perbedaan fiskal antar setiap daerah. Daerah yang mampu menyediakan potensi keuangan akan memiliki sumber pendanaan yang besar sehingga daerah tersebut akan semakin maju sedangkan daerah lain yang kurang dengan potensi daerahnya maka dapat menjadi daerah yang terbelakang. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah mentransfer dana bagi hasil diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dihitung berdasarkan angka persentase tertentu

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen pendapatan dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DAU diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pembenahan tata ruang wilayah dan peningkatan pelayanan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung dengan DAU yang

diberikan untuk meningkatkan pelayanan daerahnya (David & Priyo, 2007). Pemerintah daerah diharapkan mendanai perbaikan pelayanan daerah dengan mengembangkan pendapatan daerahnya, sehingga menjadi lebih mandiri.

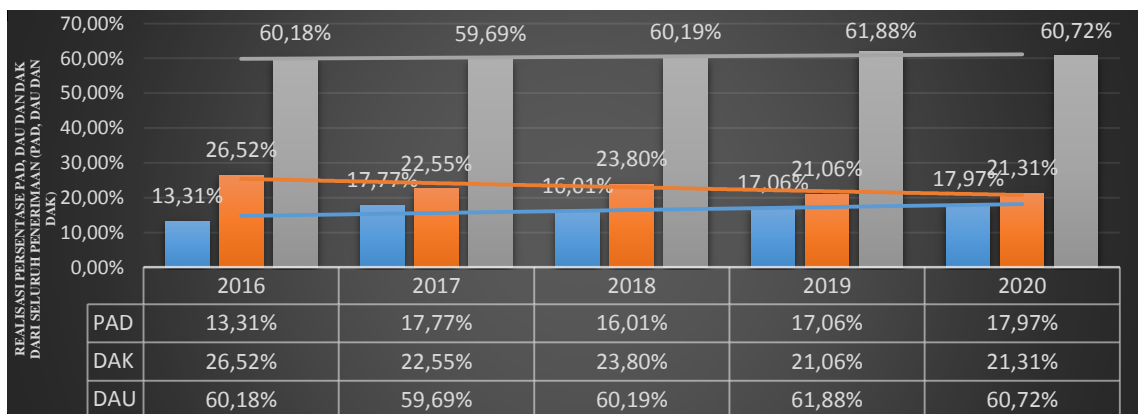
Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Merancang untuk membantu mendanai acara khusus adalah urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Menurut perhitungan standar khusus, standar umum, dan standar teknis, ditetapkan besaran bantuan dana alokasi khusus untuk masing-masing daerah. Data realisasi penerimaan PAD, DAK dan DAU Tahun 2016-2020 sebagai berikut.

Data realisasi penerimaan PAD, DAK dan DAU Tahun 2016-2020 sebagai berikut.

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan PAD, DAK dan DAU Tahun 2016-2020**

Tahun	PAD	DAK	DAU
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2016	3.526.312.686.716,04	7.027.066.038.218,00	15.947.424.500.000,00
2017	4.676.022.865.963,59	5.934.872.455.573,00	15.709.854.957.000,00
2018	4.218.974.329.768,29	6.272.065.928.444,00	15.859.119.876.692,00
2019	4.605.128.729.416,31	5.684.221.098.126,00	16.703.063.965.000,00
2020	4.490.929.311.636,09	5.325.392.788.576,00	15.173.304.115.000,00

**Gambar 1. Realisasi PAD, DAU dan DAK Tahun 2016 s.d 2020**



Gambar 1 di atas menunjukkan pemerintah daerah di Tahun 2020 merealisasikan Pendapatan Asli daerah sebesar 17,97%, Dana Alokasi Umum sebesar 60,72% dan Dana Alokasi khusus sebesar 21,31 % dari jumlah seluruh penerimaan (PAD, DAU dan DAK). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, belanja daerah selain bersumber dari pendapatan daerah asli daerah, belanja daerah juga masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Gambar 1.2 menunjukkan realisasi belanja modal mengalami

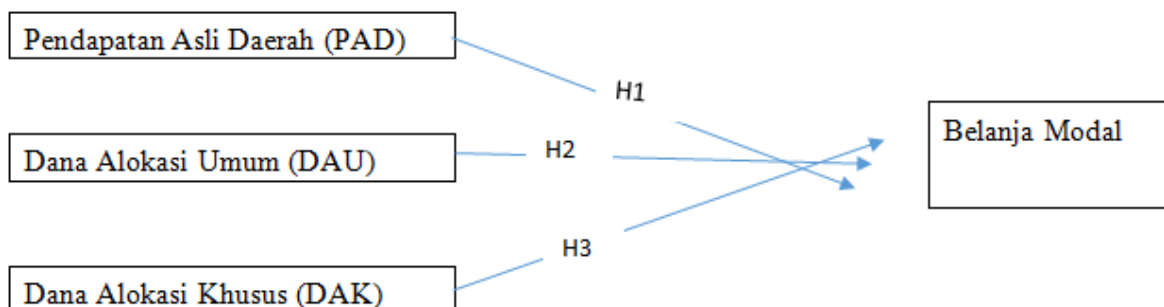
penurunan di Tahun 2016 s.d 2018, kemudian sempat naik lagi di tahun 2019 sebesar 2,98% dan turun di Tahun 2020.

Peningkatan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) masyarakat terhadap pembangunan. Dengan peningkatan pelayanan sektor publik, minat investor untuk berinvestasi di daerah dapat meningkat. Peningkatan penanaman modal dalam bentuk aset tetap, seperti gedung, infrastruktur dan aset tetap lainnya, perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka konseptual pada penelitian ini diperoleh dengan menggabungkan sumber penerimaan pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus yang dapat mempengaruhi belanja modal.

**Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian**



Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat empat hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

H1 : PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H2 : DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatory yaitu metode yang menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat, serta pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat melalui pengujian. Penelitian ini menggunakan data panel (pooled data) yaitu penggabungan antara data time series (runtun waktu) yaitu dari tahun 2016-2020 dan cross section (data silang) yaitu data Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 22. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu datanya di uji dalam uji

asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi syarat yang telah ditentukan. Setelah persyaratan regresi dari uji asumsi klasik telah terpenuhi maka pengujian regresi dapat dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2016 – 2020, dengan Jumlah 24 Kabupaten/Kota dengan rincian, sebagai berikut :

1. Kota Makassar
2. Kabupaten Gowa
3. Kabupaten Takalar
4. Kabupaten Jeneponto
5. Kabupaten Bantaeng
6. Kabupaten Bulukumba
7. Kabupaten Kepulauan Selayar
8. Kabupaten Maros
9. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
10. Kabupaten Barru
11. Kota Pare-pare
12. Kabupaten Pinrang
13. Kabupaten Sidenreng Rappang
14. Kabupaten Enrekang
15. Kabupaten Tana Toraja
16. Kabupaten Toraja Utara
17. Kabupaten Bone
18. Kabupaten Soppeng
19. Kabupaten Wajo
20. Kabupaten Sinjai
21. Kabupaten Luwu
22. Kota Palopo
23. Kabupaten Luwu Utara
24. Kabupaten Luwu Timur

Dengan demikian jumlah data penelitian (n) sebanyak 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5 tahun adalah 120 data, dengan 4 variabel tinjauan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal

### **Karakteristik Variabel Penelitian**

Karakteristik variabel penelitian pada pemerintah daerah antara lain PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal digambarkan melalui uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*) serta nilai standar deviasi yang menggambarkan penyebaran data. Deskripsi dari data penelitian disajikan dalam Tabel 2. Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 2

menunjukkan bahwa jumlah observasi dalam penelitian (N) adalah 120 pemerintah kabupaten/kota.

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (X1)	120	34897	1337231	179311.37	218245.518
DANA ALOKASI UMUM (DAU) (X2)	120	437823	1379148	661606.41	187977.936
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) (X3)	120	88403	551575	252030.17	84124.745
BELANJA MODAL (Y)	120	83754	884203	294459.37	119132.544
Valid N (listwise)	120				

**Sumber: Data Diolah, 2022 (dalam Jutaan Rupiah)**

Berdasarkan variabel tabel di atas diketahui sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata untuk belanja modal adalah sebesar 294.459,37. Nilai maksimum dari belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp884.203 dan nilai minimum dari belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp83.754.
2. Nilai rata-rata untuk pendapatan asli daerah adalah sebesar 179.311,37. Nilai maksimum dari pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp1.337.231. Dan nilai minimum dari pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Rp348,97.
3. Nilai rata-rata untuk dana alokasi khusus adalah sebesar Rp252.030,17. Nilai maksimum dari dana alokasi khusus Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp551.575. Dan nilai minimum dari dana alokasi umum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp88.403
4. Nilai rata-rata untuk Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp661.606,41. Nilai maksimum dari dana alokasi khusus Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp1.379.148. Dan nilai minimum dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp437.823

**Analisis Regresi berganda****Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.875	1.600		3.048	.003		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (X1)	.278	.059	.468	4.672	.000	.444	2.253
DANA ALOKASI UMUM (DAU) (X2)	-.168	.198	-.109	-.852	.396	.275	3.640
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) (X3)	.534	.102	.495	5.261	.000	.505	1.981

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL (Y)

Sumber : Data Diolah, 2022

Hasil estimasi model regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 4.875 + 0.278X_1 - 1.68X_2 + 0.534X_3 + e$$

Persamaan tersebut dapat diartikan:

1. Konstanta sebesar 0,4875 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ( $X_1=0$ ,  $X_2=0$ ,  $X_3=0$ ), maka Anggaran Belanja Modal tiap daerah sebesar 0,4875.
2. Besarnya nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar 0,278, artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% akan menaikkan Anggaran Belanja Modal sebesar 0,278 atau 27,8%.
3. Besarnya nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah sebesar -0,168, artinya apabila terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menurunkan Anggaran Belanja Modal sebesar -0,168 atau -16,8%.
4. Besarnya nilai koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,534, artinya apabila terjadi perubahan DAK sebesar 1% akan menaikkan Anggaran Belanja Modal sebesar 0,534 atau 53,4%

**Pengujian Asumsi Klasik****Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi terdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov Test*. Hasil uji normalitas pada Tabel 4

menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi normal yang dibuktikan dengan nilai *asympt. sig.* sebesar 0,2 bernilai lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian sebesar 5% (0,05). Oleh karena data penelitian telah terdistribusi normal, maka data dapat digunakan untuk pengujian dengan model regresi berganda

**Tabel 4. Hasil Uji Normal**

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26627956
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.043
	Positive	.037
	Negative	-.043
Test Statistic		.043
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
  - b. Calculated from data.
  - c. Lilliefors Significance Correction.
  - d. This is a lower bound of the true significance.
- Sumber: Data Diolah, 2022

### Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi di antara variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF).

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.875	1.600		3.048	.003		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (X1)	.278	.059	.468	4.672	.000	.444	2.253
DANA ALOKASI UMUM (DAU) (X2)	-.168	.198	-.109	-.852	.396	.275	3.640
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) (X3)	.534	.102	.495	5.261	.000	.505	1.981

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL (Y)

Sumber : Data Diolah, 2022



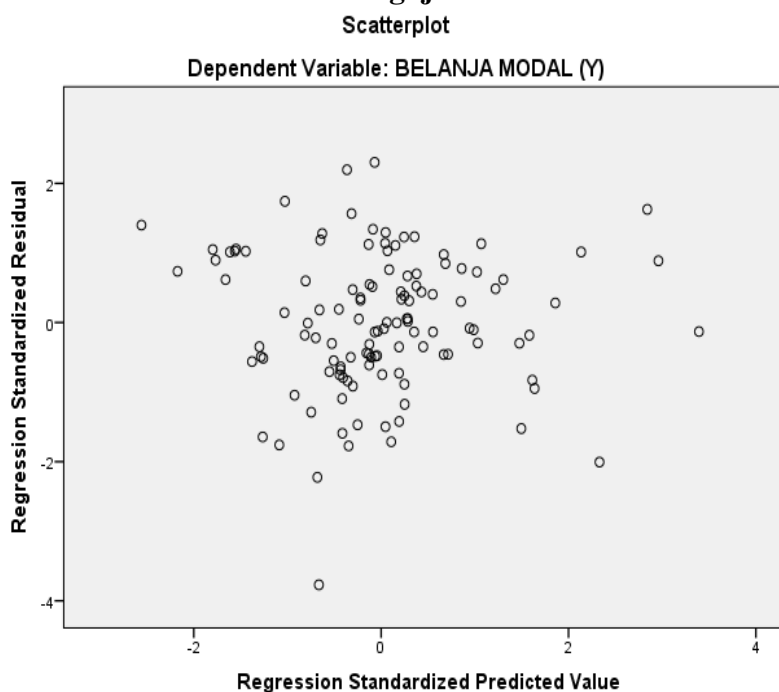
Berdasarkan Tabel 5 hasil perhitungan nilai *tolerance* memperlihatkan bahwa masing-masing variabel independen (PAD, DAU dan DAK) tidak ada yang memiliki nilai kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variable independen. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel tidak memiliki nilai yang lebih dari 10.00 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variable independen.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bilamana varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan bilamana berbeda disebut heterokedastisitas.

Maka pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini didasari oleh grafik *Scatterplot*. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik *Scatterplot* sebagai berikut.

**Gambar 3. Hasil Pengujian Heterokedasitas**



Hasil Scatterplot Model pada gambar 2 diatas dapat diketahui bahwa titik-titik tersebar secara acak, dan berdistribusi di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak ada pola teratur tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki heteroskedastisitas.

## Uji t (Parsial)

Tabel 6. Uji t (Parsial)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.875	1.600		3.048	.003		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (X1)	.278	.059	.468	4.672	.000	.444	2.253
DANA ALOKASI UMUM (DAU) (X2)	-.168	.198	-.109	-.852	.396	.275	3.640
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) (X3)	.534	.102	.495	5.261	.000	.505	1.981

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL (Y)

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama pada uji t variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ) dan t bernilai positif, maka H1 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Hipotesis kedua pada uji t variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 0.396 ( $0.396 > 0.05$ ) dan t bernilai negatif, maka H2 ditolak, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Hipotesis ketiga pada uji t variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 ( $0.000 < 0.005$ ) dan t bernilai positif, maka H3 diterima, artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

## Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F dilakukan guna menentukan *good of fit test* atau uji kelayakan model regresi untuk digunakan dalam melakukan analisis hipotesis dalam penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah *probability value (p-value)* dari nilai signifikansi F. Apabila *p-value* dalam hasil pengujian lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian. Sebaliknya, jika *p-value* lebih besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model tidak layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian

**Tabel 7. Uji F (Simultan)  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.871	3	2.624	36.069	.000 <sup>b</sup>
Residual	8.438	116	.073		
Total	16.309	119			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL (Y)

b. Predictors: (Constant), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) (X3), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (X1), DANA ALOKASI UMUM (DAU) (X2)

Sumber : Data Diolah, 2022

Hasil perhitungan statistik uji F = 36.069 dengan hasil nilai *P Value* sebesar 0,000 di bawah 0,05 yang berarti  $H_a$  diterima, secara simultan seluruh variable independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable belanja modal

### Koefisien Determinasi

**Tabel 8. Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) (X3), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (X1), DANA ALOKASI UMUM (DAU) (X2) <sup>b</sup>	.	Enter

Dependent Variable: BELANJA MODAL (Y)

All requested variables entered.

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.695 <sup>a</sup>	.483	.469	.26970	1.573
a. Predictors: (Constant), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) (X3), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (X1), DANA ALOKASI UMUM (DAU) (X2)					
b. Dependent Variable: BELANJA MODAL (Y)					

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi pada tabel 8 diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R Square*) adalah 0,469 artinya 46,9 % variasi dari semua variable bebas (PAD, DAU dan DAK) dapat menerangkan variable terikat (tingkat materialistas), sedangkan sisanya sebesar 0,531 (53,1%) diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan persamaan regresi pada tabel 3 di atas diperoleh koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,278. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar satu satuan maka akan menaikkan nilai Belanja Modal sebesar 0,278. Pada tabel tersebut juga menunjukkan t hitung untuk Pendapatan Asli Daerah 4,672 dengan angka signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wagner pada abad ke 19 yaitu dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Henri Paulus Gerungan, David Paul Elia Saerang dan Ventje Ilat (2016), Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018), Indriyani dan Suyatmin Waskito Adi (2019) bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Belanja Modal Berdasarkan persamaan regresi pada tabel 3 di atas diperoleh koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -0,168. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai Dana Alokasi Umum sebesar satu satuan maka akan menurunkan nilai Belanja Modal sebesar -0,168. Pada tabel tersebut juga menunjukkan t hitung untuk Dana Alokasi Umum -0,852 dengan angka signifikan sebesar  $0,396 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Henri Paulus Gerungan, David Paul Elia Saerang dan Ventje Ilat (2016) bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini di sebabkan karena dana transfer berupa DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak semuanya digunakan untuk belanja modal. DAU banyak dialokasin untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Belanja Modal Berdasarkan persamaan regresi pada tabel 3 di atas diperoleh koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,534. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai Dana Alokasi Khusus sebesar satu satuan maka akan menaikkan nilai Belanja Modal sebesar 0,534. Pada tabel tersebut juga menunjukkan t hitung untuk Dana Alokasi Khusus 5.261 dengan angka signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelum yang dilakukan oleh Henri Paulus Gerungan, David Paul Elia Saerang dan Ventje Ilat (2016), Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) dan Indriyani dan Suyatmin Waskito Adi (2019) menunjukkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian secara simultan, menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal yang dijelaskan oleh hasil perhitungan statistik uji  $F = 36.069$  bernilai positif dan nilai  $F$  signifikansi 0,000 berada dibawah 0,05. Hal ini berarti belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan oleh PAD, DAU dan DAK, yakni terlihat dari koefisien determinasi sebesar 46,9 % dan selebihnya 53,1 % ditentukan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelum yang dilakukan oleh Henri Paulus Gerungan, David Paul Elia Saerang dan Ventje Ilat (2016), Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018), Venny Tria Vanesha, Slamet Rahmadi dan Parmadi (2019).

### **KESIMPULAN**

1. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya pengaruh positif PAD kepada Belanja Modal memiliki penjelasan bahwa PAD yang semakin tinggi, maka Belanja Modalnya semakin tinggi juga yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang meningkat akan memberikan manfaat untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasarana terutama untuk pembangunan infrastruktur.
2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan terbukti yaitu Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif terhadap Anggaran Belanja Modal. Adanya pengaruh negatif DAU kepada Belanja modal memiliki penjelasan bahwa semakin tinggi DAU maka belanja modal semakin rendah. Dana DAU bagi pemerintah di Kabupaten/ Kota sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa.
3. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya pengaruh positif DAK terhadap Belanja Modal memiliki penjelasan bahwa DAK yang semakin tinggi, maka Belanja Modalnya semakin tinggi juga yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menggunakan dana DAK untuk belanja modal dalam kaitannya dengan program nasional.

4. Pengujian secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus adalah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan koefisien determinasi 46,9% %, dan selebihnya 53,1% % di pengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Abdul Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat., Salemba Empat. Jakarta:2041
- Abdul Halim.2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat.
- Achmad, Subekan. 2012. *Keuangan Daerah*. Malang.
- Adi, Priyo Hari dan Harianto David. 2007. “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapital”. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Awaniz, Berlian Nur. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karasidenan Pekalongan*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Bambang Prakosa, Kesit. 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. UII Press. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT Indeks.
- Dirvi Surya Abbas, Savira Yenita Sari, Mohamad Zulman Hakim, Hesty Erviani Zulaecha dan Dewi Rachmania, 2021. *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Antara Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal*, Universitas Muhammadiyah, Tangerang
- Donaldson, L. and Davis, J. (1991) *Stewardship Theory or Agency Theory*. Australian Journal of Management, 16, 49-64
- Deddy Nordiawan dan Hertianti Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983). *Stockholders and Shareholders A New Perspective on Corporate Governance*. California Management Review, 25, 88-106.
- Gerungan, Saerang, dan Ilat.2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara*. Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
- Abdul Halim, M. S. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ikhlas, Saily. 2011. Dana Alokasi Khusus dalam pembiayaan pembangunan. <http://www.blogger.sailyikhlas.com>.*
- Indriyani dan Adi. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal. Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.*
- Jurniawan, Suryatini. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal kota dan kabupaten di provinsi bali. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 7, No.3 hal. 1225-1281*
- Martini, Ni Luh Dina Selvia, Dkk. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal pada Kabupaten Buleleng tahun 2006 – 2012". e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha.*
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit ANDI.*
- Munawir, 2011, Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kesebelas. Liberty. Yogyakarta*
- Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.*
- Oktora, F. E. dan Winston. 2013. "Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah". Jurnal Accountability Vol. 2 No. 1, Juni 2013*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 145/PMK07/2013 tentang pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan*
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang bagan Akun standar*
- Rochmat Soemitro (2004). Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2. PT Refika Aditama. Bandung*
- Solikin, Ikin. 2010. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.*
- Supriyono, R.A. Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: UGM Press, 2018*
- Sekaran, Uma. 2013. Research Methods for Business. Jakarta: Salemba Empat*
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Vanesha, Rahmadi dan Parmadi. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 14. No. 1, Januari - Juni 2019*